

Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Di Daerah Sulawesi Utara

Hendrik M. A. Rompis^{a,1}, Max Rembang^{a,2}, Daud M. Liando^{a,3}

¹ hendrik.rompis@gmail.com, ²maxrembang@gmail.com, ³ daudliando@gmail.com

^aProgram Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115 Indonesia

Abstract

The development of the world of transportation, tourism in the last few years before the pandemic era developed very rapidly, the need for travel is an opportunity for a region and even a country in order to increase the income and welfare of its people. For this reason, the Indonesian government issued the Government issued a policy, namely the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2016 concerning Visa Exemption, where 169 countries were granted Visa Exemption and the purpose of this policy was to increase foreign tourists coming to Indonesia because with The number of visits by foreign tourists of course can encourage economic development, tourism and improve good relations between countries. North Sulawesi Province is one of the tourist destinations for both local and foreign tourists, with the arrival of many foreign nationals being an opportunity as well as a challenge for the government in how to regulate regional security and order. Apart from getting great benefits from the economic turnover in the region, the arrival of foreigners can also be a threat to violations of existing regulations in Indonesia, especially in North Sulawesi.

Keywords: Policy, Visa Exemption, Foreigner

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi khususnya di bidang transportasi dunia saat ini semakin maju sehingga memudahkan setiap orang untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara dengan kapal, pesawat, kereta api atau kendaraan bermotor. Dengan perkembangan tersebut maka negara Indonesia perlu memanfaatkannya untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara ke Indonesia, karena dalam industri pariwisata Indonesia memiliki banyak tempat menarik dan ditunjang dengan kekayaan alamnya, seperti memiliki ribuan pulau yang indah, dengan berbagai pulau. Sumber daya alam yang beragam, dengan ragam ras, budaya, tarian, kulineran, dan letak geografis yang unggul, berdekatan dengan beberapa negara, sehingga dapat dengan mudah menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Pertama kali Bebas Visa Kunjungan diterapkan oleh Pemerintah negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2003 dengan memberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat kepada 11 negara sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat. Kemudian mengalami perubahan pertama pada tanggal 17 Desember tahun 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, setelah itu pada tanggal 26 Februari 2008 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terjadi perubahan kedua yaitu dengan memberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat kepada 12 negara sesuai dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Daerah Sulawesi Utara memiliki kekayaan yang melimpah dengan banyaknya sumber daya alam yang ada seperti tambang, kelapa, kopra, cengkeh serta memiliki pulau – pulau yang indah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang asing yang berkunjung baik untuk berwisata ataupun untuk berinvestasi di daerah Sulawesi Utara. Selain itu Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang dinilai lengkap karena memiliki Bandara Internasional Sam Ratulangi, Pelabuhan Internasional Bitung serta memiliki Pos Lintas Batas Miangas dan Marore untuk dilalui orang asing sebagai tempat masuk dan keluar. Dibandara Sam Ratulangi sendiri memiliki penerbangan reguler ke luar negeri antara lain Silk Air rute Singapura dan Garuda Indonesia ke Davao. Keberadaan rute-rute internasional tersebut berdampak secara langsung dalam menunjang perekonomian daerah.

Pengaruh positif suatu negara adalah mendorong masyarakatnya untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara yang mampu, seperti hotel atau hotel, restoran, pendapatan daerah yang dihasilkan dari tempat-tempat wisata yang digunakan oleh wisatawan asing, atau pendapatan ekonomi penduduk lokal, yang merupakan komoditas yang dibeli oleh turis asing Penjualan. Sementara itu, dampak negatifnya adalah semakin banyaknya orang asing yang datang ke suatu negara untuk kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak dapat dikendalikan dengan baik, sehingga

melakukan kegiatan ilegal seperti penyalahgunaan izin tinggal dan kegiatan ilegal. tingkah laku. Serta memberikan visa kunjungan gratis, batas waktu), illegal fishing, illegal immigration, human trafficking, penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen atau kejahatan lain yang membahayakan negara.

Tentunya karena banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Sulawesi Utara, tidak semuanya mengikuti aturan keimigrasian yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini menjadi struktur bagi petugas imigrasi di Sulawesi Utara untuk melakukan berbagai fungsi keimigrasian (yaitu, menjaga keimigrasian) Tantangan. Keamanan nasional dan penegakan hukum. Sehubungan dengan kebijakan kunjungan bebas visa ke 169 negara / wilayah, maka perlu diantisipasi dampak negatif orang asing yang masuk atau keluar wilayah NKRI, khususnya di Sulawesi Utara. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian yang diundangkan pada tahun 2011, Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri memiliki asas "kebijakan selektif", artinya untuk melindungi kepentingan nasional hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keselamatan dan keamanan yang diperbolehkan. ketertiban umum masuk dan berada di wilayah negara Republik Indonesia.

Beberapa faktor lain yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Sulawesi Utara dapat mencegah wisatawan asing berkunjung ke Sulawesi Utara, antara lain jalan sempit, berlubang, kemacetan lalu lintas, sampah yang berserakan di jalan, banjir, dan pengelolaan tempat wisata yang ada Buruk, kurangnya hotel atau hotel, kurangnya penguasaan bahasa asing di masyarakat, dan kearifan masyarakat lokal, orang-orang ini tidak dapat menerima budaya dunia luar, dan bandara saat ini tidak cukup untuk memperluas skalanya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan kunjungan bebas visa di Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat/Pegawai Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Badan Intelijen Negara Perwakilan Sulawesi Utara, PT. Angkasa Pura I, Maskapai, Travel, Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia perwakilan Sulawesi Utara, Pemandu Wisata dan Masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Bebas Visa Kunjungan di Daerah Sulawesi Utara adalah :Observasi partisipatif, Wawancara, Kajian

dokumen. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif dimana metode ini memiliki tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, tajam dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti (Mohammad Nazir, 2008:63)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sulawesi Utara (Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di kota Manado. Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi atau tepatnya 0°LU - 3°LU dan 123°BT - 126°BT yang merupakan salah satu daerah yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa serta berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Utara		
No	Kabupaten/ Kota	Ibukota
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Lolak
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Uki
3	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan
4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Boroko
5	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Ondong Siau
6	Kabupaten Kepulauan Talaud	Melonguane
7	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tahuna
8	Kabupaten Minahasa	Tondano
9	Kabupaten Minahasa Selatan	Amurang
10	Kabupaten Minahasa Tenggara	Ratahan
11	Kabupaten Minahasa Utara	Airmadidi
12	Kota Bitung	Bitung
13	Kota Kotamobagu	Kotamobagu
14	Kota Manado	Manado
15	Kota Tomohon	Tomohon

Sumber: Wikipedia.com.2020

Sulawesi Utara memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi seperti dilansir dari laman pariwisata.sulawesiutara.com antara lain :

Tabel 2.

Daftar Tempat Wisata di Sulawesi Utara		
No	Nama Tempat Wisata	Kab / Kota
1	Pulau Bunaken, Gunung Tumpa, Bukit Tentempangan, Pulau Siladen, Air Terjun Kima Atas, Gunung Lokon, Sparta Stable Puncak Rurukan, Gunung Mahawu, Danau Linow, Hutan Pinus Lahendong, Bukit Doa, Puncak Tetena	Manado
2	Pantai Batu Angus, Taman Marga Satwa Tandurusa, Pantai Canada, Pulau Lembeh	Tomohon
3		Bitung

4	Danau Moat Danau Tondano, Air Terjun Tahapan Telu, Rumah Pohon Urongo, Benteng Moraya, Pantai Mahembang, Bukit Kasih, Taman Wisata Toar Lumimuut, Pondok Daun, Watu Pinawetengan, Air Terjun Tahapan Telu	Kotamobagu	September	5965	6306	12730	11879
			Oktober	3791	7687	8342	10392
			November	4270	6433	5735	9261
5	Pantai Pall, Pantai Pulisan, Casabaiao Resort, Kinaari Resort, Raeway Hills, Gunung Klabat, Pulau Gangga, Pulau Lihaga, Pulau Nain, Pulau Talise, Pulau Bangka, Waruga Sawangan,	Minahasa	Desember	3820	8587	8845	10743
			Tahunan	40624	79303	122100	129607
6	Pantai Moinit, Pantai Alar, Pantai Popareng	Minahasa Utara	Sumber: BPS Sulut.2020				
7	Dodoku Aer Konde, Pulau Tumbak, Pulau Naga	Minahasa Selatan	Data diatas didukung dengan data dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Sam Ratulangi dimana menunjukkan kunjungan Wisatawawan Asing mengalami peningkatan sejak tahun 2016, dapat lihat sebagai berikut :				
8	Pantai Lolan, Tanjung Ompu, Pantai Molosing, Pantai Babo, Pantai Pasir Putih, Pulau Tiga, Air Panas Bakan, Kolam Desa Tudu Aog	Minahasa Tenggara	Tabel 4. Data Kunjungan Perkebangsaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Sam Ratulangi				
9	Pantai Lalapide, Pantai Dakupang, Pantai Pananualeng, Pantai Bado, Pantai Naha	Bolaang Mongondow	No Kebangsaan	2016	2017	2018	2019
10	Desa Adat Bannada, Pulau Sara, Pulau Karakelang, Danau Lotah,	Sangihe	1 China	27.304	63.076	107.075	116.150
11	Pantai Lobbo, Goa Weta, Air Terjun Ampadoap, Gua Batu Kapal, Pulau Kabaruan.	Talau	2 Jerman	1.670	1.793	2.348	2.429
12	Gunung Api Karangetang, Danau Makalehi, Permandian Air Panas Lehi, Danau Kapeta, Permandian Bidadari, Pantai Taman Laut Balirangen, Makam Raja Lokongbanua.	Sitaro	3 Singapura	1.516	2.669	2.546	2.117
			4 Amerika Serikat	1.585	1.512	1.721	1.767
			5 Australia	1.029	1.028	1.039	1.114
			6 Inggris	1.103	1.029	923	952
			7 Swiss	753	857	983	880
			8 Italia	686	868	934	870
			9 Malaysia	569	950	890	838
			10 Prancis	681	702	780	754
			11 Lain-Lain	13.992	18.245	20.618	25.785
			TOTAL	50.888	92.729	139.857	153.656

Sumber : laman pariwisata.sulawesiutara.com. 2020

Dengan banyaknya tempat Wisata di Daerah Sulawesi Utara dapat menarik Wisatawan Asing untuk berkunjung, bila dilihat dari data Statistik Dasar BPS Sulut yang dilansir dari laman sulut.bps.go.id menunjukkan bahwa Kunjungan Tamu Asing dari Tahun 2016 sampai tahun 2019 terus meningkat, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.
Data Statistik BPS SULUT Kunjungan Tamu Asing Tahun 2016 - 2019.

Bulanan dengan Tahunan	Tamu Asing (jiwa)			
	2016	2017	2018	2019
Januari	625	7674	8505	10864
Februari	1535	5119	10794	11302
Maret	1297	5148	10114	10761
April	1427	5891	10200	10906
Mei	1018	5589	9405	9775
Juni	1295	4678	10107	8342
Juli	7677	7305	11875	11207
Agustus	7904	8886	15448	14175

Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di daerah Sulawesi Utara ditinjau dari model implementasi Van Meter dan Van Horn (Nugroho, 2004), sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementers). Arah disposisi para pelaksana (implementers) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, karena mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Dari hasil wawancara dengan para informan, terlihat kecenderungan peningkatan terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Sulawesi utara sebagai dampak dari kebijakan bebas visa yang dikeluarkan oleh presiden. Mengenai pemahaman standar serta tujuan yang terkandung dalam kebijakan bebas visa tersebut, dalam peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan disebutkan bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Dari informasi tersebut terlihat bahwa standar yang diinginkan serta tujuan yang hendak dicapai dalam aturan ini adalah terjadinya peningkatan perekonomian negara terutama daerah tujuan wisatawan, dengan asumsi semakin banyak wisatawan mancanegara, semakin tinggi juga perkembangan ekonomi yang dapat dirasakan daerah dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan 13 (tiga belas) informan, semua mengatakan bahwa Kebijakan Bebas Visa Kunjungan sudah tepat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan semenjak kebijakan Bebas Visa Kunjungan dikeluarkan dari tahun 2016 kunjungan wisatawan asing ke Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey juga mengatakan dilansir dari laman sindonews.com tanggal 31 Agustus 2018 bahwa Sektor Pariwisata Menopang Kemajuan Ekonomi SULUT dimana tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sulut sebanyak 27.059 meningkat menjadi 48.288 pada 2016 dan 2017 jumlah wisatawan mancanegara mencapai angka 86.976, serta selang Januari sampai Juni 2018, jumlah wisatawan telah menembus angka 59.125 orang wisatawan. Selama tahun 2015 sampai tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sulut selalu berada pada angka diatas 6 persen atau lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Persentase tingkat kemiskinan Sulut berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang berada pada range 10-11%. Bahkan di wilayah Pulau Sulawesi, kemiskinan di Sulut adalah yang paling rendah.

Namun dari hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa yang terjadi dalam penelitian ini dimana dampak peningkatan jumlah wisatawan asing di Sulawesi utara belum sepenuhnya menyentuh masyarakat kalangan menengah kebawah hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan Badan Intelejen Negara (BIN) dimana informan tersebut menginformasikan bahwa jumlah peningkatan wisatawan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang ada dibawah, dampak yang paling merasakan akan

peningkatan turis asing adalah pengelola hotel, travel agent, maskapai penerbangan, serta pengelola wisata dan rumah makan namun sector lain tidak berdampak signifikan seperti sector industry kerajinan, dan retail. Dari pengalaman empiris peneliti dilapangan memang Nampak sekali jumlah peningkatan turis asing di Kota Manado namun kebanyakan berasal dari negara cina. Peneliti menganalisis kurangnya dampak yang signifikan terhadap perekonomian jika dibandingkan jumlah turis yang masuk adalah kondisi ekonomi dari turis, tidak semua turis membelanjakan uang mereka pada saat berwisata, kebanyakan hanya menikmati suasana dan alam sekitar.

2. Sumber Daya

Unsur manusia dalam organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa saja yang perlu diambil dari lingkungan dan bagaimana caranya untuk mendapatkan input-input tersebut, eknologi dan cara yang dianggap tepat untuk mengolah dan mentransformasikan input-input tadi menjadi output yang memenuhi keinginan publik (lingkungan).

Salah satu Kendala mengapa dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan asing di Sulawesi Utara kurang berdampak pada masyarakat menengah kebawah disebabkan karena kurangnya kemampuan berbahasa asing oleh pelaku usaha, sehingga peluang keuntungan menjadi berkurang. Selain itu juga kemampuan bahasa inggris wisatawan sangat rendah karena kebanyakan wisatawan berasal dari cina. Hal ini didasari pengalaman empiris peneliti yang pernah membangun komunikasi dengan sebuah kelompok wisatwasan dari cina namun semuanya tidak tahu bahasa inggris.

Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan anggaran pemerintah dalam membangun citra daerah untuk menarik turis asing, dimana masih banyak destinasi wisata yang belum tertata dengan baik yang seharusnya dapat di explore lebih dalam lagi. Meskipun komitmen pemerintah daerah provinsi Sulawesi utara tinggi menurut informan staf khusus gubernur bidang pariwisata, namun fakta empiris yang dirasakan peneliti berkata lain, dimana masih ada beberapa keluhan wisatawan terkait destinasi wisata dicontohkan pengelolaan bukit kasih yang tidak mengalami perkembangan secara fisik namun retribusi masuk mengalami peningkatan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit,

dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando.

Dari hasil penelitian mengenai karakteristik lembaga yang menjalankan kebijakan kunjungan bebas visa terlihat jelas bahwa peranan yang besar dipegang oleh pihak imigrasi yang merupakan ujung tombak negara dalam meyarang masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Selanjutnya didukung oleh lembaga lainnya yang menjamin keberadaan wisatawan di daerah Sulawesi utara. Selain lembaga pelaksana utama dan pelaksana pendukung, hal yang dapat dilihat dari karakteristik pelaksana kebijakan bebas visa kunjungan adalah adanya kerjasama yang pada setiap elemen lembaga terkait terhadap wisatawan asing yang merupakan dampak dari kebijakan bebas visa kunjungan, hal ini nampak pada jawaban pada hampir semua informan terutama informan dari pemerintah. Sinergitas antar lembaga merupakan salah satu kunci keberhasilan kebijakan bebas visa kunjungan di Sulawesi utara.

4. Sikap / Kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Dalam mengimplementasikan kebijakan, kerja sama antar implementor perlu dipupuk karena dengan adanya kerja sama yang terjalin dengan baik di antara mereka maka akan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan sehingga tujuan yang diharapkan semakin mudah untuk tercapai.

Tugas dari petugas Imigrasi yang ada di bandara Sam Ratulangi yaitu melakukan pemeriksaan keimigrasian berupa Paspor, Visa bila ada, mewawancarai orang yang akan masuk dan apabila tujuannya jelas maka petugas akan memberikan ijin masuk. Dalam hal pemberian Bebas Visa Kunjungan yang diperiksa adalah Paspor dan bagi orang asing yang akan berwisata harus menunjukkan tiket pulang dan bukti pemesanan hotel. Petugas Imigrasi akan bertindak tegas bila orang asing memberikan keterangan tidak benar dalam hal maksud dan tujuan datang ke Sulawesi Utara.

Hasil wawancara dengan para informan terkait dengan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan bebas visa kunjungan, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam menerima dan mengawasi keberadaan turis selama di Sulawesi Utara, seperti sikap petugas bandara yang wajib memeriksa seluruh barang dan dokumen pendukung, apabila lengkap dan tidak melanggar aturan maka dipersilahkan masuk dan sebaliknya apabila ada pelanggaran, maka akan ditindak sesuai koridor hukum yang berlaku. Hal yang sama ditunjukkan pihak imigrasi yang memeriksa kedatangan para wisatawan asing dan mengawasi mereka selama berada di Sulawesi Utara bersama TIMPORA. Selanjutnya sikap yang ditunjukkan oleh para pelaku usaha, pelaku usaha wisata, travel agent, pihak hotel dan masyarakat, maka akan cenderung lebih ramah dan tidak terlalu memusingkan kelengkapan dokumen serta tujuan wisatawan

karena ingin menjaga kenyamanan mereka selama di Sulawesi Utara dan agar meningkatkan pendapatan mereka. Dari hasil tersebut terlihat bahwa sikap pelaksana kebijakan tergantung dari sikap yang ditunjukkan oleh wisatawan asing yang masuk ke Sulawesi Utara.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Dalam hal komunikasi antar organisasi di Sulawesi Utara sudah dibentuk beberapa kegiatan seperti Tim Pengawasan Orang Asing yang terdiri dari Instansi – Instansi terkait baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan dalam hal Pengawasan Orang Asing, Komunitas Intelijen Daerah, Komite Fasilitas Bandara.

Dalam penelitian ini komunikasi antar lembaga dalam mendorong terwujudnya tujuan bebas visa kunjungan yakni peningkatan ekonomi daerah dan nasional, komunikasi bukan hanya dalam hal mengawasi pergerakan orang asing, namun juga bagaimana membuat mereka nyaman selama berada di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu merupakan tugas dari pemerintah daerah dan pelaku perjalanan wisata serta pelaku usaha untuk membuat kegiatan, program yang menunjang hal tersebut. Dari hasil wawancara dengan informan staf khusus gubernur mengenai komunikasi yang dibangun untuk mensukseskan tujuan bebas visa kunjungan adalah dimana gubernur membangun komunikasi antar instansi terkait dimana setiap instansi baik Satgas Pariwisata, forum stakeholder Industri, stakeholder dinas pariwisata kabupaten kota dan stakeholder instansi vertical, dari pernyataan tersebut bahwa komunikasi antar lembaga tersebut berjalan dengan baik. Hal senada juga dituturkan informan dari kepolisian, kejaksaan dan pelaku usaha dan wisata dimana komunikasi selalu dibangun dalam rangka menjaga keamanan daerah serta peningkatan perekonomian daerah. Komunikasi antar lembaga bersifat tupoksi dan komunikasi antar lembaga negara dengan pihak swasta bersifat wajib dan selama ini berjalan dengan baik.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan yang terdiri atas antara lain lingkungan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat dalam dimensi ekologi pemerintahan sebagai lahan sasaran kebijakan dapat memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai implementor kebijakan, pemerintah tidak dapat mengabaikan begitu saja terhadap ketiga kondisi tersebut.

Dari beberapa informan yang ditanyakan selaku masyarakat yang menikmati langsung hasil dari Implementasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan paling banyak merasakan keuntungan dari segi Ekonomi dan hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Utara Bapak Johny Lieke seperti dilansir dari laman tribunnews.com tanggal

15 Februari 2018 bahwa kunjungan Wisatawan Mancanegara yang meningkat memberikan dampak yang besar bagi perhotelan dan restaurant di Sulawesi Utara.

Dari fakta yang dirasakan peneliti dilapangan mengenai aspek sosial mengenai keberadaan wisatawan asing yang datang ke Sulawesi utara yang merupakan dampak kebijakan bebas visa kunjungan, di mata masyarakat dimana membawa dampak positif terkait pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat selain itu juga masyarakat merasa bangga bahwa daerahnya dikenal sampai diluar negeri dengan fakta tersebut berimbas pada penerimaan social masyarakat terhadap turis asing didaerahnya.

Kondisi ekonomi suatu wilayah dapat juga mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan dijalankan, termasuk kebijakan bebas visa kunjungan. Keadaan perekonomian di Sulawesi Utara sebelum masa pandemic mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dimana hingga kuartal ke empat tahun 2019 mengalami peningkatan diatas 5% artinya kondisi tersebut menjadi indicator bahwa wilayah tersebut aman untuk dikunjungi, dengan berjalan baiknya roda perekonomian berpengaruh terhadap harga dan perilaku masyarakatnya. Namun sejak pandemi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara menurun seiring melambannya pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu penyebab turunnya ekonomi sulut akibat berkurangnya pendapatan dari sector pariwisata.

Apabila dilihat dari kondisi politik dalam negeri dan daerah di Sulawesi Utara sekarang ini relative stabil, kepemimpinan Gubernur tidak mengalami guncangan politik sehingga situasi daerah aman terkendali. Hal tersebut berdasar pada informasi dari informan staf khusus gubernur bidang pariwisata, selain itu pengalaman empiris peneliti juga yang tinggal di Sulawesi Utara terlihat bahwa kondisi politik di Sulut berjalan dengan baik.

7. Faktor – faktor keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Sulawesi utara

Dalam penelitian ini , selain membahas teori dari van meter van horm, peneliti juga membahas mengenai faktor penentu keberhasilan terimplementasinya kebijakan bebas visa kunjungan di Sulawesi utara yang indikatornya adalah peningkatan kunjungan wisatawan asing di Sulawesi Utara sejak tahun 2016:

- Dukungan dari setiap Kepala Daerah Baik dari tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten yang ada di Sulawesi Utara serta Masyarakat
- Banyaknya forum, komite atau grup yang terbentuk sehingga terjalin hubungan yang baik antar instansi ;
- Banyak dilakukan promosi Pariwisata di Media Sosial dan mengadakan event – event

didaerah Sulawesi Utara; Seperti Manado Fiesta, Tomohon International Flower Festival, Festival Pesona Bunaken, Festival Pesona Selat Lembeh, Mister Asian 2016, *Maritime Security Deskstop Exercise and Law of The Sea Course (LTSC) 2017*, Paskah International 2018, *Archipelagic and Island States (AIS) Forum Startup and Business Summit 2019*

- Pihak Aparat memberikan rasa aman terhadap wisatawan asing sehingga mereka merasa nyaman berkunjung di Daerah Sulawesi Utara;
- Masyarakat yang memiliki sikap toleransi yang tinggi;
- Banyaknya pengembangan dari segi infrastruktur seperti jalan Tol, bendungan yang mencegah terjadinya banjir serta Pembangunan Bandara Internasional yang diharapkan dapat mendorong kunjungan wisatawan asing.
- Hal yang membantu Kebijakan Bebas Visa Kunjungan adalah yaitu terlibatnya berbagai komponen yaitu Travel Agent, perhimpunan hotel, pemandu wisata dan masyarakat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing.
- Dengan adanya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan wisatawan asing tidak perlu melakukan pengurusan visa lagi.

8. Faktor – faktor yang menghambat kunjungan wisatawan asing di daerah Sulawesi Utara
Selain faktor keberhasilan, peneliti juga menganalisis adanya faktor yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi bebas visa kunjungan di Sulawesi Utara, sebagai berikut:

- Virus Corona. Virus corona merupakan virus yang mulai teridentifikasi di Indonesia sejak Januari 2020 dan di Sulawesi Utara bulan maret 2020, sejak saat itu pemerintah melakukan pembatasan keberangkatan dan menutup akses kedatangan terutama dari luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui bebas visa terhambat.
- Melakukan Pelanggaran Keimigrasian berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian Bebas Visa Kunjungan.
- Faktor Monopoli atau satu kelompok dalam pariwisata sangat berbahaya karena tidak bersaing sehat dan dalam segi perekonomian hanya pihak tertentu saja yang diuntungkan.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Daerah Sulawesi Utara, peneliti menyimpulkannya:

1. Dari hasil penelitian didapati peningkatan jumlah kunjungan wisatawan luar negeri di Sulawesi Utara sejak tahun 2016 hingga 2019 yang didominasi wisatawan dari cina, namun jumlah kunjungan tersebut belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah.
2. Sumberdaya manusia yang digunakan sebelum pandemic tergolong kurang pada instansi imigrasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah lemahnya tingkat penguasaan bahasa inggris oleh petugas dan pelaku usaha sehingga mengurangi interaksi dengan wisatawan ditambah lagi sebagian wisatawan asing tidak fasih berbahasa inggris.
3. Lembaga yang menjalankan Bebas Visa Kunjungan di Sulawesi Utara terbagi dalam 2 bagian yakni pelaksana utama yakni pihak imigrasi dan pelaksana pendukung seperti kepolisian, TNI, BIN dan pemerintah daerah. Untuk itu kerjasama merupakan kunci keberhasilan kebijakan ini.
4. Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan bebas visa kunjungan, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam menerima dan mengawasi keberadaan turis selama di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di Indonesia tetap wajib diikuti oleh seluruh wisatawan asing yang datang.
5. Di Daerah Sulawesi utara ketiga aspek ini berjalan dengan baik, namun pada masa pandemic ini aspek social dan ekonomi berubah namun masih dalam taraf aman, sedangkan politik selama ini berjalan kondusif dan mampu menjamin keberadaan para wisatawan yang datang.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan penelitian, peneliti kemudian memberikan saran atau rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Selama masa pandemic ini, sebaiknya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadikan ini sebagai masa evaluasi dan perbaikan hal-hal yang masih kurang dalam pencapaian tujuan bebas visa kunjungan dengan mengevaluasi kinerja masing-masing lembaga dan berkoordinasi dengan lembaga terkait dan membuat rencana jangka pendek dan panjang guna menyambut era normal yang baru yang tentunya berbeda dengan keadaan sebelumnya
2. Guna memperbaiki sisi sumberdaya yang digunakan dalam implementasi kebijakan bebas visa kunjungan, disarankan agar pemerintah membuat agen-agen pariwisata yang mempromosikan dan menyambut kedatangan tamu dengan segala kemampuan yang ada seperti penguasaan bahasa inggris,

penguasaan tempat wisata dengan membuat kursus bahasa dan sekolah singkat

3. Terkait sikap pelaksana, perlu adanya koordinasi yang intens antar lembaga menjadi aktoe pelaksana kegiatan yang termasuk dalam TIMPORA, selain mengawasi keradaan orang asing, keberadaan TIMPORA juga diharapkan merupakan 'garansi' rasa ama dan nyaman badi wisatawan asing.
4. Pemerintah juga dirasa perlu mengedukasi masyarakat Sulawesi Utara dengan menjadikan sektor pariwisata primadona dan memberdayakan masyarakat untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah.
5. Pentingnya pemerintah menjaga stabilitas social, ekonomi dan politik daerah guna tetap menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan datang ke Sulawesi utara. Kestabilan ketiga aspek tersebut merupakan salah satu kunci kunjungan wisatawan datang ke Sulawesi Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.
- Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nugroho D. R.. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : Gramedia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.